

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Di Kota Semarang.

Prima Mahardika Putra, Zainal Hidayat

ABSTRAK

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah menyerahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi bencana di daerah. Salah satu bencana alam yang sering melanda Kota Semarang adalah banjir. BPBD Kota Semarang menggunakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar hukum pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Masalah yang muncul adalah bagaimana implementasi dari regulasi tersebut, khususnya pada tahap pra bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari regulasi tersebut, khususnya pada tahap pra bencana dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, serta menggunakan metode triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi, khususnya pada tahap pra bencana belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari total 11 kegiatan, ada tiga kegiatan yang tidak dilaksanakan dan sisanya dilaksanakan dengan terkendala. Implementasi regulasi dipengaruhi oleh faktor anggaran, koordinasi dan sumberdaya yang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Saran yang diberikan adalah pertama, perlunya peningkatan upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah terlaksana agar tidak terdapat kendala serta melaksanakan kegiatan yang saat ini belum dilaksanakan. Kedua, perlu dilakukannya asesment terhadap faktor yang mempengaruhi proses implementasi.

Kata kunci: Implementasi, Penanggulangan Bencana, Tahap Pra Bencana, Anggaran, Koordinasi, Sumber Daya Manusia.

**Implementation of Semarang City Regional Regulation Number 13 of 2010
concerning the Implementation of Disaster Management in the Pre-Disaster
Phase in Semarang City**

Prima Mahardika Putra, Zainal Hidayat

ABSTRACT

Disaster management is a series of efforts which include the establishment of development policies that are at risk of disasters, disaster prevention activities, emergency response and rehabilitation. Disaster management is the responsibility of the central government and local government. The government handed over to the Regional Disaster Management Agency (BPBD) to deal with disasters in the region. One of the natural disasters that often hit Semarang was flooding. BPBD of Semarang uses Semarang City Regional Regulation Number 13 of 2010 concerning the Implementation of Disaster Management as the legal basis for implementing disaster management in the Semarang. The problem that arises is how the implementation of the regulation, especially pre-disaster stage. The purpose of this study was to determine the implementation of these regulations, especially at the pre-school stage and the factors that influence them. This study uses a descriptive qualitative research model with data analysis techniques from Miles and Huberman, and uses the source triangulation method to test the validity of the data. The results of this study indicate that the implementation of regulations, especially at the pre-disaster stage has not gone well. This can be seen from total eleven task, three of them weren't done and the rest done with some problems. The implementation of regulation is influenced by factors of budget, coordination and resources that are in accordance with the theory put forward by Van Metter and Van Horn. The advices given is, first, the need for increased efforts in the implementation of activities that have been carried out so that there are no obstacles and carrying out activities that didn't implemented yet. Second, it's necessary to assess the factors that influence the implementation process.

Keywords: Implementation, Disaster Management, Pre-Disaster Phase, Budget, Coordination, Human Resources.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan adanya pemanasan global, muncul ancaman mencairnya es di kutub. Hal ini memberikan potensi terendahnya beberapa wilayah di Indonesia yang saat ini saja sudah berada setara atau lebih rendah dari permukaan laut.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang disebut bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam regulasi yang sama, penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan tanggung jawab ini diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu pemerintah daerah memberikan tanggung jawab ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Menurut BNPB, banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendahnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Bencana banjir umumnya terjadi di daerah yang memiliki ketinggian permukaan tanah lebih rendah daripada permukaan air, saluran air yang kurang berfungsi dengan baik, aliran sungai yang tidak lancar akibat endapan maupun sampah serta daerah yang memiliki resapan air buruk akibat alih fungsi lahan resapan air.

Dalam 17 tahun terakhir, mayoritas bencana alam skala besar yang terjadi di Indonesia adalah banjir, dengan total 8053 kejadian. Kota Semarang mengalami banjir sebanyak

62 kali dalam empat tahun terakhir dengan frekuensi kejadian yang meningkat setiap tahun.

BPBD Kota Semarang berpedoman pada sejumlah regulasi dari pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana membagi penanggulangan bencana dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Prabencana;
- b. Tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Dalam melaksanakan tahapan tersebut, BPBD Kota Semarang dibagi menjadi tiga bidang yaitu; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; Bidang Kedaruratan dan Logistik; serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Secara umum Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki fungsi membuat kebijakan teknis terkait mitigasi bencana; pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi daerah potensi rawan bencana; pembuatan rencana aksi daerah; sosialisasi terkait daerah rawan bencana, teknis penanganan bencana; pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian bencana; serta pengembangan sumber daya penanganan bencana.

Sayangnya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum mampu meminimalisir resiko banjir. Hal ini terlihat dari beberapa amanat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang belum terlaksana.

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf (d) belum dilaksanakan. Kepala Seksi Pencegahan, Y.M. Yonata Kristanto, S.Sos menyatakan bahwa hal ini belum dilaksanakan karena belum seragamnya persepsi lintas sektor dalam upaya penanggulangan bencana terpadu serta

belum di masukkannya isu kebencanaan pada dokumen rencana pembangunan Pemerintah Kota Semarang, maupun perencanaan dari dinas lain. (Hasil wawancara 21 Agustus 2018).

Permasalahan lain nampak pada pasal 24 ayat (2) pada huruf d mengamanatkan bahwa Pencegahan penanggulangan bencana dilakukan pula melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Kepala Seksi Pencegahan menyatakan bahwa, “penegakan tata ruang bukan tugas pokok kita, kita hanya membantu dinas yang berwenang. Tapi sampai saat ini belum ada koordinasi tentang tugas tersebut”. (Hasil wawancara 21 Agustus 2018).

Kegiatan ketiga yang masih belum tepat sasaran adalah pada pelaksanaan pasal 33 ayat (2) huruf c yang berbunyi “penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern”. Kepala Seksi Pencegahan menyatakan bahwa, hal ini belum terpenuhi karena BPBD belum mampu untuk menggelar gladi penanggulangan

bencana bagi seluruh anggota KSB dan KTB. (Hasil wawancara 21 Agustus 2018).

Maka dari itu penulis merasa perlu diadakan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Tahap Pra Bencana di Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana di Kota Semarang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan pada tahap pra bencana di Kota Semarang.

2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana di Kota Semarang.

D. Kajian Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Hinggis dalam Pasolong (2010:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkaian berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lainnya untuk mencapai sasaran strategi.

Van Metter dan Van Horn dalam Leo agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Gordon dalam Pasolong (2010:58) berpendapat bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan

kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit – unit, serta metode pelaksanaan program. Menginterpretasikan berarti mendefinikan istilah – istilah program kedalam rencana dan petunjuk yang dapat diterima secara feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen – instrumen, mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi kebijakan publik.

Dari definisi diatas, terlihat bahwa secara umum implementasi menyangkut tiga hal yakni: 1) adanya tujuan kebijakan, 2) adanya aktivitas pencapaian tujuan, dan 3) adanya hasil kegiatan.

Model Implementasi

1. Model Donald S. van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:142), variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Ukuran dan Tujuan kebijakan; (2) Sumberdaya; (3) Karakteristik agen pelaksana, (4)

Kecenderungan (*disposition*) agen pelaksana; (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino (2008:144), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap; Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi kebijakan, dan Variabel – variabel diluar undang – undang yang mempengaruhi implementasi.

Karakteristik dari masalah kebijakan mencakup: 1) Kesukaran teknis; 2) Keberagaman perilaku yang diatur; 3) Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran; 4) Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi kebijakan mencakup: 1) Kecermatan

dan kejelasan penjenjangan tujuan – tujuan resmi yang akan dicapai; 2) Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan; 3) Ketetapan alokasi sumber dana; 4) Keterpaduan hirarki dalam lingkungan dan diantara lembaga atau instansi pelaksana; 5) Aturan – aturan pembuat keputusan dari badan – badan pelaksana; 6) Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang – undang; 7) Akses formal pihak – pihak luar.

Variabel – variabel diluar undang – undang yang mempengaruhi implementasi mencakup: 1) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi; 2) Dukungan publik; 3) Sikap dan sumber – sumber yang dimiliki kelompok masyarakat; 4) Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

3. Model George C. Edward III

Edward III dalam Leo Agustino (2008:149-150) mengemukakan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi, yaitu: 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3)

Disposisi; 4) Struktur Birokrasi.

4. **Model Grindle**

Menurut Grindle dalam Riant Nugroho (2014:672) menyatakan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya.

Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program
6. Sumberdaya yang dikerahkan

Konteks implementasi antara lain:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber pustaka. Teknik yang

digunakan untuk menginterpretasi data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman dengan tahap analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pearikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data.

F. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pada Tahap Pra Bencana Di Kota Semarang

Penelitian ini menggunakan fenomena penelitian yang termuat dalam bab 2 tentang pra bencana dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Terdapat dua tugas utama yang harus dilaksanakan oleh BPBD Kota Semarang pada tahap pra bencana yang meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

a. **Perencanaan penanggulangan bencana dan evaluasi kebijakan pembangunan yang beresiko bencana**

BPBD Kota Semarang telah menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat regulasi melalui konsultan karena kurang mampunya SDM yang ada untuk menyusun dokumen perencanaan secara mandiri. Sementara terkait evaluasi belum dilaksanakan diakibatkan kurangnya anggaran untuk menyewa konsultan.

b. **Pengurangan resiko bencana**

Seluruh kegiatan dalam rangka pengurangan resiko bencana telah dilakukan dengan beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pelatihan KSB dan KTB terkendala kurangnya anggaran sehingga BPBD Kota Semarang belum mampu untuk melatih seluruh anggota KSB dan KTB secara serentak.

Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) belum mampu

mengundang simpati dunia usaha karena adanya mindset bila mengikuti forum maka akan diminta sejumlah uang untuk pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Selain itu belum maksimalnya pemanfaatan FPRB nampak pada koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang belum mampu menyatukan langkah dengan memasukkan kajian kebencanaan yang telah dibuat oleh BPBD Kota Semarang kedalam perencanaannya masing – masing.

c. **Pencegahan**

Seluruh kegiatan pencegahan telah dilaksanakan, namun terdapat beberapa kendala. Pelaksanaan kegiatan EWS terkendala kurangnya dana sehingga BPBD Kota Semarang baru bisa memasang dua unit *Early Warning System* (EWS), belum diadakannya pelatihan penggunaan EWS untuk Pusdalops PB yang nantinya akan bertugas untuk mengoperasikan EWS serta belum dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan penggunaan EWS kepada masyarakat.

Selain itu, koordinasi koordinasi yang kurang baik antara BPBD Kota Semarang dan BBWS Pemali Juana menghambat pemasangan EWS.

d. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan

Kegiatan pemaduan dalam perencanaan pembangunan belum dilaksanakan karena belum diadopsinya kajian kebencanaan yang dibuat BPBD Kota Semarang oleh OPD lain.

e. Persyaratan analisis resiko bencana

Kegiatan analisis resiko bencana sudah dilaksanakan dan menghasilkan kajian resiko bencana. Namun, pelaksanaannya belum sesuai dengan amanat regulasi dimana seharusnya hasil kajian tersebut juga masuk kedalam rencana pembangunan maupun rencana lain milik OPD yang terkait kebencanaan.

f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang

Kegiatan pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang belum dilaksanakan karena belum adanya permintaan koordinasi dari Dinas

Penataan Ruang Kota Semarang. Hal ini disebabkan belum adanya adopsi perencanaan terkait kebencanaan dan analisis resiko bencana oleh Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.

g. Pendidikan dan pelatihan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan sudah dilaksanakan dengan adanya beberapa kendala. Kurangnya anggaran menyebabkan pelatihan KSB dan KTB belum dilaksanakan secara serentak dan melibatkan seluruh unsurnya. Selain itu, Pusdalops PB juga belum mendapatkan pelatihan penggunaan EWS.

h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana dimaknai oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Belum terbentuknya SOP bidang diakibatkan kecakapan SDM yang kurang memadai.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:

a. **Kesiapsiagaan**

Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan telah dilakukan hampir sempurna oleh BPBD Kota Semarang. Terdapat satu kendala dalam pelaksanaannya yakni pada Pelaksanaan Pusdalops PB yang belum mendapatkan pelatihan penggunaan EWS.

b. **Peringatan dini**

Kegiatan peringatan dini diwujudkan melalui pemasangan EWS. terkendala kurangnya dana sehingga BPBD Kota Semarang baru bisa memasang dua unit *Early Warning System* (EWS), belum diadakannya pelatihan penggunaan EWS untuk Pusdalops PB yang nantinya akan bertugas untuk mengoperasikan EWS serta belum dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan penggunaan EWS kepada masyarakat.

Selain itu, koordinasi koordinasi yang kurang baik antara BPBD Kota Semarang dan BBWS Pemali Juana menghambat pemasangan EWS. Akibat dari tidak adanya koordinasi, terjadi sedikit kesalahan pada saat memasang EWS di Kelurahan Karangroto. Ditemukan

fakta bahwa pemasangan EWS terlalu rendah 30cm yang dapat berimbas pada potensi peringatan banjir yang salah. Koordinasi yang buruk juga terjadi dengan PMI Kota Semarang menyebabkan otoritas penggunaan EWS bantuan dari american red cross ada di mereka.

Dari sisi SDM kurangnya kemampuan terkait teknis lapangan khususnya di daerah sungai serta belum mampunya BPBD Kota Semarang dalam hal ini yang berwenang adalah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, belum mampu mengoperasikan EWS.

c. **Mitigasi bencana.**

Saat ini, BPBD Kota Semarang baru mampu melaksanakan tugas mitigasi pada ranah non struktural dengan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Terkait pelaksanaan mitigasi struktural, BPBD Kota Semarang hanya membantu dengan memberikan masukan dan menyediakan data yang diperlukan.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota

**Semarang Nomor 13 Tahun 2010
Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana pada
Tahap Pra Bencana di Kota
Semarang**

a. Anggaran

Terdapat beberapa kegiatan yang terkendala oleh anggaran, antara lain: evaluasi dokumen perencanaan kebencanaan, pelatihan KSB dan KTB, serta belum adanya pelatihan penggunaan EWS kepada Pusdalops PB serta pelatihan dan sosialisasi ke masyarakat.

b. Koordinasi

Faktor koordinasi yang kurang baik menyebabkan belum tertariknya dunia usaha untuk berkontribusi dalam FPRB. belum dilaksanakannya pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang. Ketiga permasalahan ini berakar dari tidak dimasukkannya perencanaan kebencanaan dan kajian kebencanaan yang telah dibuat oleh BPBD Kota Semarang kedalam perencanaan pembangunan Kota Semarang maupun OPD lain.

Selain itu juga kurang baiknya koordinasi dengan BBWS Pemali Juana yang menyebabkan pemasangan EWS di Kelurahan Karangroto terlalu rendah 30cm dari tinggi muka air sungai pada saat normal. Selain itu, tidak adanya koordinasi terkait pemanfaatan EWS bantuan dari *American Red Cross* akan menyia – nyiakan potensi alat tersebut.

c. Sumber daya manusia

Faktor SDM menjadi krusial bilamana SDM yang ada tidak mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan tugas yang ada.

Permasalahan terkait SDM nampak pada belum mampunya BPBD Kota Semarang untuk melakukan penyusunan dan evaluasi secara mandiri terhadap dokumen perencanaan penanggulangan bencana, serta belum dibuatnya SOP. Selain itu, saat ini Pusdalops PB belum mampu mengoperasikan EWS.

G. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana di Kota Semarang telah terlaksana dengan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Terdapat tiga kegiatan yang belum dilaksanakan oleh BPBD Kota dan sisanya telah dilaksanakan dengan beberapa kendala.

Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi implementasi, yakni: 1) anggaran; 2) koordinasi; 3) sumber daya manusia. Faktor yang ada sesuai dengan teori yang dikemukakan Van Metter dan Van Horn, namun pada penelitian ini hanya ditemukan dua faktor dari keseluruhan teori yang dikemukakan.

Saran

1. Perlunya peningkatan upaya dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah terlaksana agar tidak terdapat kendala serta melaksanakan kegiatan yang saat ini belum dilaksanakan.
2. Perlu dilakukannya asesment terhadap faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Diperlukannya *plotting* yang lebih diutamakan pada kegiatan yang terkendala. Perlunya

pemaksimalan FPRB untuk menjamin kualitas koordinasi. Diperlukan pula pelatihan yang lebih intensif dan terfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Afifudin. H., & Beni A. S. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia
- Agustino, Leo. (2008). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Creswell, John W. (2012). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods approaches, Third edition. Terjemahan oleh: Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handoko, T. Hani. (2009). Manajemen. Yogyakarta: BPFE
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah, dari Filosofi ke Implementasi. Bandung: Pustaka Setia
- Kusumasari, Bevaola. (2014) Manajemen Bencana dan Kapasitas Pemerintah Lokal. Yogyakarta: Gava Media
- Kodoatie, Robert J., dan Roestam Sjarief. (2006) Pengelolaan Bencana Terpadu Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Nugroho, Riant. (2014). Metode Penelitian Kebijakan. Yograkarta: Pustaka Pelajar
- Nurjanah,dkk. (2012). Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta

Pasolong, Harbani. (2012). Metodologi Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Ramli, Soeratman. (2011). Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Management). Jakarta: Dian Rakyat.

Sarinah, Mardalena. (2017). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Deepublish

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, dan Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Jurnal:

Hastuti, Sri. "Partisipasi Penganggaran & Keadilan Prosedural Untuk Meningkatkan Kinerja Studi Di PT. Karana Line Surabaya". Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis Vol 10 No 1. (2010). Diakses pada 25 November 2018

Basri, Ramlah. "Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara". Jurnal EMBA Vol.1 No.4. (2013). Diakses pada 25 November 2018

Atmoko, Tjipto. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2011). Diakses pada 25 November 2018

Penelitian terdahulu:

Heru Indra Kiswanto. Implementasi Peraturan Daerah No 07 Tahun 2012 Kabupaten Bojonegoro Tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Penanggulangan Bencana Banjir Bengawan Solo). Skripsi. Universitas Negeri Surabaya

Febi Leofano. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kota Padang. Skripsi. Universitas Andalas

Website:

<http://big.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia> diakses pada 10 April 2018 pukul 22.17 WIB

<http://bnpb.cloud/dibi/grafik1> diakses pada 11 April 2018, pukul 16.27 WIB

<https://republika.co.id/berita/nasional/umum/17/10/23/oy9o56438-bnpb-usulkan-kajian-risiko-bencana-masuk-syarat-imb> diakses pada 30 November 2018, pukul 15.00 WIB

<https://simanggaran.semarangkota.go.id/portal/perwalapbd> diakses pada 30 November 2018, pukul 10.00 WIB

Sumber Regulasi Pemerintah:

Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang,

Peraturan Kepala BNPB No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2011 Tentang Kampung Siaga Bencana

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016 - 2021